LAPORAN KINERJA INSTANSI KECAMATAN PADAMARA KAB. PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN PADAMARA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

---- Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara atau yang dikenal dengan singkatan LKjIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Govermance* berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat esselon II ke atas untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Berpijak dari uraian tersebut di atas maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Padamara Tahun 2021 yang sederhana ini dan jauh dari kata sempurna. Terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN baik ASN maupun non ASN (Tenaga Harian Lepas) yang sinergi dalam melaksanakan semua program kerja, dan harapan kami kedepan agar kegiatan dan capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan statusnya dan bisa ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Padamara pada tahun-tahun yang akan datang.

Padamara, Januari 2022

CAMAT PADAMARA

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN PADAMARA PURBALINGGA

SARNO,S.IP
Pembina
NIP. 19650622 199012 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Padamara Tahun 2021 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaananggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Padamara tahun 2016-2021. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Padamara dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 454.028.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 417.456.461 atau mencapai 91,94 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Padamara dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 adalah 101,13 %, dari Target IKM sebesasar 84 % dengan realisasi sebesar 84.95%

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padamara telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Kecamatan

di Kabupaten Purbalingga.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
B. Maksud dan Tujuan
C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
D. Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kerja Utama
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
C. Akuntabilitas Keuangan
D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :
Tabel 2.2 :
Tabel 2.3 :
Tabel 2.4 :
Tabel 3.1 :
Tabel 3.2 :
Tabel 3.3 :
Tabel 3.4 :
Tabel 3.5 :
Tabel 3.6 :
Tabel 3.7 :
Tabel 3.8 :
Tabel 3.9 :
Tabel 3.10 :
Tabel 3.10 :
Tabel 3.11 :
Tabel 3.12 :
Tabel 3.13 :
Tabel 3.14 :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Padamara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi pada hasil, maka perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun Anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Padamara selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Padamara sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga ,capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Padamara Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Padamara Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2021. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran.

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan LKjIP yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PurbalinggaTahun 2016 - 2021.
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di kabupaten Purbalingga.

b. Kondisi Umum Kecamatan Padamara

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kecamatan Padamara dengan luas wilayah 1.768,006 ha, terdiri dari tanah kering seluas 699,231 ha dan tanah sawah seluas 1068,775 ha dengan kondisi udara dan curah hujan sedang. Wilayah Kecamatan Padamara terdiri dari 1 Kelurahan, 13 Desa, 38 dusun, 60 RW dan 243 RT dan terletak di bagian barat Kabupaten Purbalingga dengan jarak kurang lebih 7 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.

Wilayah Kecamatan Padamara memiliki kedudukan geografis yang sangat strategis sebagai jalur alternatif dengan tingkat aksesibilitas (keteraksesan/ketercapaian) yang tinggi ke wilayah Kabupaten Banyumas sehingga menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat.

2. Batas Administrasi

Batas administrasi Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kutasari
- Sebalah Selatan : Kecamatan Kalimanah
- Sebelah Timur : Kecamatan Purbalingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

3. Pembagian Wilayah Administrasi

Perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kecamatan Padamara

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	Karangsentul	58,10	-	3	15

2	Karangpule	95,222	2	2	9
3	Karangjambe	149,7	4	4	19
4	Sokawera	115,6	3	6	16
5	Bojanegara	115,5	3	5	37
6	Gemuruh	180,376	3	8	9
NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
7	Dawuhan	224,06	5	5	20
8	Prigi	139,892	2	4	14
9	Purbayasa	94,998	2	4	12
10	Karanggambas	146,317	3	5	22
11	Mipiran	134,363	3	6	17
12	Kalitinggar	89,526	3	3	15
13	Kalitinggar Kidul	84,247	2	2	9
14	Padamara	140,105	3	3	19
	JUMLAH	1768,006	38	60	243

4. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Padamara pada tahun 2021 sebanyak 45.594 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 22.938 (50,31%) orang dan penduduk perempuan sebanyak 22.656 (49,69%) orang yang tersebar di 13 (tiga belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
1	Karangsentul	1328	1346	3674

2	Karangpule	775	723	1.477
3	Karangjambe	2052	2014	4066
4	Sokawera	1307	1285	2592
5	Bojanegara	3205	3184	6389
6	Gemuruh	2094	2067	4161
7	Dawuhan	2.136	2.057	4.193
8	Prigi	1593	1564	3157
NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
9	Purbayasa	1132	1131	2263
10	Karanggambas	2186	2145	4331
11	Mipiran	1679	1666	3345
12	Kalitinggar	1.339	1.301	2.683
13	Kalitinggar Kidul	870	879	1749
14	Padamara	1448	1493	2941
Jumlah		**23.144**	**22.855**	**45.999**

5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padamara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Kelompok jabatan fungsional;
g. Kelurahan.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan, mempunyai fungsi :
   a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
   b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
   c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
   d) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
   e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
   f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   g) pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
   h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan fungsinya

i) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan**,**verifikasi dan akuntansipengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidangumum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan,kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventariasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD,fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan

penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa,pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban *Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI),pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotongroyong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat,keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian,pemuda dan olahraga, penangulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.
7. Kelurahan mempunyai tugas membantu mempunyai tugas membantu camat dalam :

   a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
   b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
   c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
   d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
   e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

   dan mempunyai fungsi :

   a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan ; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun uraian tugas dan fungsi di kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan.

b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi Pemerintahan, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventariasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat kelurahan meliputi Rukun Tetangga / Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan kelurahan, pemberdayaan kelurahan/lomba desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahananan Masyarakat Kelurahan (LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastruktur (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pendataan potensi dan profil kelurahan.

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keaganaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Padamara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki – laki	9 orang	53
2	Perempuan	8 orang	47
	JUMLAH	17 orang	100

Dari jumlah tersebut pegawai dengan pendidikan pendidikan S1 menduduki urutan pertama yaitu sejumlah 8 orang (47%), disusul dengan pegawai dengan klasifikasi pendidikan SLTA/sederajat sejumlah 6 orang (35%), pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda sejumlah 1 orang (6%), pegawai dengan pendidikan

SLTP sejumlah 0 orang (0%) , serta pegawai dengan pendidikan SD sejumlah 1 orang (6%), seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sarjana (S1)	9 orang	47
2	Diploma (D3)	2 orang	6
3	SLTA	4 orang	35
3	SLTP	0 orang	0
4	SD	1 Orang	6
5			
JUMLAH		16 Orang	100

Dari komposisi Golongan, PNS dengan Golongan IV berjumlah 1 orang (10%), PNS Golongan III merupakan yang paling banyak jumlahnya 9 0rang (56 %), PNS Golongan II sejumlah 2 orang (17 %), seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Golongan / Ruang

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	%
1	Golongan IV	1 Orang	12
2	Golongan III	7 Orang	46
3	Golongan II	2 Orang	18
4	Golongan I	-	-
5	Tenaga Kontrak	6 orang	24
	JUMLAH	16 Orang	100

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Padamara sebanyak 17 orang, dengan komposisi SDM berdasarkan Fungsi dapat dilihat ada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5

Komposisi SDM berdasarkan Fungsi

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris		1	1
	a. Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	2	3
	b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	2	3
3.	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4		4
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	2
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1		1
Jumlah Total		9	6	15

Sedangkan Pejabat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan yang dipersyaratkan, untuk pejabat eselon III dari 2 jabatan semua sudah mengikuti Diklat Pim III. Sedangkan untuk pejabat eselon IV sejumlah 4 orang, yang sudah mengikuti diklatpim IV sebanyak 1 orang sedangkan 3 orang belum mengikuti diklat, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Adapun komposisi SDM tersebut berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan golongan/ruang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6

Daftar PNS di kecamatan Padamara

No	Nama Pegawai/ NIP	Jabatan/ Golongan	Diklatpim	Pend	Tempat/ Tgl Lahir
1.	Sarno, SIP NIP. 196506221990121001	Camat IV/a	Diklatpim III	S1	Banyumas 22-06-1965
2.	Darni, S.Sos NIP.196606111992012001	Sekretaris Kecamatan III/d	Diklatpim IV	S1	Banyumas, 22-06-1966
3.	Dwy Setyadi, S.IP	Kasi Pemerintahan,		S1	Purbalingga

	NIP. 198709232007011001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum III/c			23-09-1987
4.	Tri Puji Mulyani, S.Sos NIP. 197802172010012003	Kasubag Perencanaan dan Keuangan III/c		S1	Purbalingga 17-02-1978
5.	Susi Handayani, SE NIP. 197502232000122001	Kasubag Umum dan kepegawaian III/d		S1	Purbalingga 23-02-1975
6.	Aris Priyanto NIP. 196510301990031007	Petugas Keamanan (Satpol PP) III/a		SLTA	Purbalingga 30-10-1965
7.	Narsito, SH NIP. 197001032009061001	Pengelola Pajak Daerah III/a		S1	Purbalingga 03-01-1970
8.	Susanti NIP. 198607092006042002	Pengelola Keuangan II/d		SLTA	Purbalingga 09-07-1986
9.	Tuginem NIP. 196807272008012010	Pengadministrasi Umum II/d		SLTA	Semarang 27-07-1968

Jumlah Pegawai honorer di kecamatan Padamara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.7
DAFTAR NAMA PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP
DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)

No	Nama Lengkap	Pend. Terakhir	Pejabat Yang TTD SK	No. SK/Tgl SK	Jenis Pekerjaan
1	Narpun	SD	Bupati Purbalingga	814/0046/2019 31-12-2019	Petugas Kebersihan

2	Agus Supriono	SMA	Camat Padamara	814/01/2021 04-01-2021	Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum
3	Anggun Rokhmawati, S.Pd	S1	Camat Padamara	814/02/2021 04-01-2021	Operator Komputer
4	Willy Novi Anjasmoro	D3	Camat Padamara	814/03/2021 04-01-2021	Operator Komputer
5	Roy Bamindha Prima, ST	S1	Camat Padamara	814/04/2021 04-01-2021	Operator Komputer
6	Panjer Wisnu Legowo	SMA	Camat Padamara	814/05/2021 04-01-2021	Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum

6. Permasalahan yang dihadapi

Hambatan serta permasalahan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara khususnya di wilayah Kecamatan Padamara Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

a. Kurangnya Tenaga Aparatur Pemerintahan di Tingkat Desa dan Kelurahan.
b. Masih belum meratanya pengetahuan perangkat desa akan Undang-undang atau aturan terkait dengan isu dan masalah yang dihadapi desa.
c. Sering terjadi masalah pada alat rekam KTP karena gangguan jaringan internet sehingga pelayanan masyarakat sering terganggu,
d. Masyarakat di kecamatan Padamara yang terdiri dari berbagai latar belakang baik pendidikan, mata pencaharian dan lain lain sehingga menciptakan emosional yang berbeda-beda dalam permintaan pelayanan umum.

B. Maksud dan Tujuan

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); Bab IV pasal 13 huruf d disebutkan SKPD wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. **Maksud**

   Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2021 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Padamara, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai

2. **Tujuan**

   Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2021 adalah :

   a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Padamara dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
   b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Padamara.
   c. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Camat kepada publik atas kinerja setiap kegiatan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2020.
   d. Sebagai masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
   e. LKjIP yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate serta transparan* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

C. **SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN**

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

2. Kondisi Umum Kecamatan

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

D. Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal,nasional, global dan tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padamara Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Perencanaan kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

2. Mendorong kehidupan masarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
   a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
   b. Mendorong Terciptanya kehidupan yang religious/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
   c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
   a. Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
   b. Pilar Pembangunan Pedesaan
   c. Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
   d. Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan

4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

- **Tujuan**

  Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dicapai oleh Kecamatan Padamara dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 terutama pada misi pertama (1) yakni Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima berkualitas kepada Masyarakat..

- **Sasaran**

  Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

- **Program Kegiatan**

  OPD Kecamatan Padamara pada Tahun 2021 melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

  1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

     Terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yaitu :

     a. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
     b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
     c. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
     d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
     e. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

  2. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

     Terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, yaitu :

     a. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
     b. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

c. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padamara
Tahun 2021

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Padamara
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga

terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PADAMARA
TAHUN 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84

D. ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Padamara pada tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Padamara setelah perubahan sebesar Rp. 396.000.000,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 1.908.000.000 (Belanja Pegawai Rp.2.111.133.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.220.000,-) dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 100.000.000,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2021

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :	Rp. 2.677.283.500
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 2.677.283.500
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 30.891.000
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 89.390.000

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 29.230.000
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 53.266.500
PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
JUMLAH ANGGARAN	**Rp. 519.171.000**

Tabel 2.5

Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana kantor	Rp. **213.571.000**
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	**Rp. 305.600.000**

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padamara
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp. 305.600.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Padamara selaku pengemban amanah masyarakat dan selaku perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berusaha melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi (LKjIP).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Padamara melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2021.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja } \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
≥ 100	Sangat Berhasil
75 s.d 100	Berhasil
55 s.d 75	Cukup Berhasil
≤ 55	Kurang Berhasil

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Padamara Tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	84.95

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 55 %	55 % s.d 75 %	5 % s.d 100 %	>100 %
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di kecamatan	101,13	-	-	-	Sangat Berhasil

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Padamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2021 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" dengan satu indikator kinerja adalah sebesar 101,13 % dengan predikat Sangat Berhasil.

Pengukuran/perhitungan Indeks Kegiatan Utama (IKU) yang merupakan pengukuran dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Padamara, hasil pengolahannya adalah sebagai berikut :

a. Gambaran Umum Responden Survei Kepuasan Masyarakat.

Responden dalam penelitian ini adalah orang atau pelanggan di Kecamatan Padamara. Responden yang dilakukan survei merupakan masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan di Kecamatan Padamara.

Dalam penelitian ini diambil jumlah responden sebanyak 150 responden. Gambaran umum responden dilakukan guna mengetahui gambaran sampel yang diambil dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Padamara. Rincian terkait identas responden sebagai berikut :

1. Umur

Gambaran umum responden yang pertama adalah umur responden. Responden dalam survei adalah masyarakat yang memiliki usia lebih dari sama dengan 17 tahun keatas, karena dianggap sudah dapat berpikir dewasa. Kelompok usia yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini adalah masyarakat dengan usia 17 tahun sampai dengan >60 tahun yang pernah melakukan pengurusan administrasi di Kecamatan Padamara. Persebaran usia responden dalam survei dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara

No	Umur	Frekuensi	Prosentase
1	17 – 20 tahun	50	33,33%
2	21 – 30 tahun	31	20,67%
3	31 – 40 tahun	30	20,00%
4	41 – 50 tahun	23	15,33%
5	51 – 60 tahun	13	8,67%
6	>60 tahun	3	2,00%
Total		150	100,00%

Berdasarkan tabel 2 didapatkan informasi bahwa dari 150 responden yang berumur antara 17-20 tahun sebanyak 50 orang (33,33%), responden yang berumur antara 21-30 tahun sebanyak 31 orang (20,67%), responden yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 30 orang (20,00%),responden yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 23 orang (15,33%),responden yang berumur antara 51-60 tahun sebanyak 13 orang (8,67%), sedangkan responden

yang berumur >60 tahun sebanyak 3 orang (2,00%). Jumlah responden yang paling banyak adalah responden dengan usia 17-20 tahun, yaitu sebanyak 50 orang (33,33%).

2. Jenis Kelamin

Gambaran umum responden yang kedua adalah jenis kelamin responden. Perbandingan jenis kelamin responden dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	90	60,00%
2	Perempuan	60	40,00%
Total		150	100%

Berdasarkan tabel 3 didapatkan informasi bahwa dari 150 responden, yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 90 orang atau 60,00%, sedangkan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 60 orang atau 40,00%.

2. Pekerjaan Utama

Gambaran umum responden yang ketiga adalah jenis pekerjaan responden. Variasi pekerjaan responden dalam survei kepuasan masyarakat Kecamatan Padamara bermacam-macam, mulai dari pelajar/mahasiswa, pegawai swasta sampai dengan pegawai negeri. Variasi pekerjaan responden Kecamatan Padamara tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4

Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase
1	PNS/TNI/POLRI	6	4,00%
2	Pegawai Swasta	14	9,33%
3	Wiraswasta	31	20,67%
4	Pelajar/Mahasiswa	40	26,67
5	Lainnya	59	39,33
Total		150	100,00

Berdasarkan tabel 4 didapatkan informasi bahwa dari 150 responden dari Kecamatan Padamara yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 6 orang (4,00%), selanjutnya yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 14 orang(9,33%), yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 31 orang(20,67%), yang bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 40 orang(26,67%), sedangkan yang bekerja selain yang disebutkan sebanyak 59 orang(39,33%). Paling banyak responden memiliki pekerjaan utama sebagai lainnya, yaitu sejumlah 59 orang(39,33%).

b. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi,kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsure pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	NilaiInterval	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SangatBaik

Sumber : *Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayana Publik*

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsure pelayanan dilakukan dengan analisis statistic deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Padamara.

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Tingkat Pelayanan pada Masing-Masing Unsur :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran
1	Persyaratan	3,240	Baik
2	Prosedur	3,173	Baik
No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran
3	Waktu Pelayanan	3,107	Baik
4	Biaya/Tarif	3,840	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,140	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,247	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,333	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3,767	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,767	Sangat Baik

Tabel 6

Hasil Perhitungan IKM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Persyaratan	3,240	Baik	0,360
2	Prosedur	3,173	Baik	0,352

3	Waktu Pelayanan	3,107	Baik	0,345
4	Biaya/Tarif	3,840	Sangat Baik	0,426
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,140	Baik	0,349
6	Kompetensi Pelaksana	3,247	Baik	0,360
7	Perilaku Pelaksana	3,333	Baik	0,370
8	Maklumat Pelayanan	3,767	Sangat Baik	0,418
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,767	Sangat Baik	0,418

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2020 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 84,95. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan biaya/tariff dengan nilai 3.840 .sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur 3.107.

a) **Unsur Persyaratan**

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden menanggapi kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan di Kecamatan Padamara BAIK,yakni dengan nilai IKM 3,240 dan mutu pelayanan (B). Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyaratan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja masih butuh sosialisasi lagi antara lain dengan cara di tempel dipapan pengumuman untuk persyaratan yang harus di penuhi agar tidak terjadi kesalahan.

b) **Unsur Prosedur**

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Padamara pada unsur prosedur pelayanan dinilai BAIK dengan nilai IKM 3.173 Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden yang masuk kategori baik. Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Padamara sudah cukup baik dari unsure prosedur pelayanannya. Alur pelayanan sudah cukup jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Namun, masyarakat desa tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan di kantor kecamatan.

c) **Unsur Waktu Pelayanan**

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dari unsur waktu pelayanan masuk kategori BAIK. Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu pelayanan sudah cepat. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai IKM 3,107 Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan secara cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

d) **Unsur Biaya/Tarif**

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3.840. Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis. Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan dikantor kecamatan Padamara sebagian besar gratis.

e) **Unsur Produk Layanan**

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3.140. Dari hasil survey masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang dihasilkan Kecamatan Padamara masuk kategori baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f) **Unsur Kompetensi Pelaksana**

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Padamara dari unsur kompetensi masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,247. Petugas telah terdidik dan paham akan tugas dan fungsinya masing-masing di Kecamatan. Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survey yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada di bagian *front office* kurang

memadai dikarenakan ketika di waktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan di waktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian *front office* yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Adapula kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan.

g) **Unsur Perilaku Pelaksana**

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori BAIK dengan nilai IKM 3.333. Di unsur perilaku petugas hasil survey menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h) **Maklumat Pelayanan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antara lain mengenai lahan parkir khusus pengunjung. Pada kenyataanya halaman di depan kantor kecamatan tersebut luas, akan tetapi tidak tersedia lahan khusus parkir yang membuat masyarakat merasa kurang puas saat berkunjung dikantor kecamatan tersebut. Masyarakat berpendapat bahwa kondisi demikian membuat pengunjung tidak tertib parkir, dan tidak tersedianya lahan khusus parkir membuat kendaraan mereka terpapar langsung oleh cahaya matahari meskipun nilai unsure pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,767.

i) **Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan**

Kinerja unit layanan Kecamatan Padamara dalam unsur penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survei adalah SANGAT BAIK yakni pengelolaan pengaduan sudah ada, namun kurang berfungsi secara maksimal dan nilai IKM yang diperoleh senilai 3,767.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimulai tanggal 2 November 2021 dan berakhir tanggal 20 November 2021, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Padamara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata di atas nilai persepsi 3 (tiga).
2. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Padamara setelah dikonversikan 84,95 berada pada interval 81,26 – 100, Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Padamara adalah Sangat Baik.

c. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Padamara yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

No	Belanja Daerah	Target (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	**Belanja Operasi**	2.610.061.000	2.398.688.109	91,90
	Belanja Pegawai	2.156.033.000	1.981.231.648	91,89
	Belanja Barang & Jasa	454.028.000	417.456.461	91,95
	Belanja Hibah			
2	**Belanja Modal**	270.000.000	268.531.000	99,46
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	200.000.000	100,00
	Belanja Modal Gedung & Bangunan	250.000.000	248.531.000	98,72
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.500.000	6.500.000	99,41

	Total Belanja	**2.880.061.000**	**2.667.219.109**	**92,61**

Guna mendukung pencapaian kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Padamara pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah ditetapkan dan dilaksanakan, maka anggaran biaya yang digunakan berupa ***Belanja Tidak Langsung*** dan ***Belanja Langsung*** yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padamara Tahun Anggaran 2021.

Belanja Tidak Langsung meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, yang seluruhnya terdiri atas kegiatan-kegiatan : Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2021, Perjanjian Kinreja (PK) dan Renja tahun 2021, Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk memudahkan kita melihat Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Padamara memenuhi standar yang diharapkan maka Ihktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Padamara Tahun 2021 untuk Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA PEGAWAI	2.11.133.000	1.548.009.693	95,94

1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.304.572.000	1.251.470.148	96,55
	a. Gaji pokok PNS	969.153.000	928.417.100	97,06
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	b. Tunjangan Keluarga	88.755.000	87.411.626	96,09
	c. Tunjangan Jabatan	84.822.000	84.400.000	98.22
	d. Tunjangan Fungsional Umum	24.161.000	22.930.000	96,32
	e. Tunjangan Beras	52.404.000	51.780.300	96,09
	f. Tunjangan PPh	4.563.000	4.576.860	99,42
	g. Pembulatan Gaji	28.000	8.817	97,96
	h. Iuran Jaminan Kesehatan	66.956.000	64.306.762	86,65
	i. Iuran Jaminan Kematian	5.920.000	5.725.398	96,73
	j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.974.000	1.908.461	96,73
2	Tambahan Penghasilan PNS	806.561.000	688.061.500	94,13
	a. Tamsil Berdasarkan Beban Kerja	580.125.000	503.437.500	93,84
	b. Tamsil Berdasarkan Kondisi Kerja	226.436.000	184.624.000	100

Tabel 2

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Padamara Tahun 2021
Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
	BELANJA PEGAWAI	**99.430.000**	**99.340.000**	**98.67**
1	Honorarium PNS	43.100.000	39.900.000	92,57

	a. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.300.000	39.900.000	92,57
	b. Honorarium Pengadaan barang /jasa	800.000	800.000	100
2	Honorarium Non PNS	28.400.000	25.800.000	90,84
	a. Belanja jasa Tenaga Operator Komputer	61.500.000	60.100.000	97,72
	b. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.800.000	22.800.000	100
	c. Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.400.000	30.400.000	100
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
	BELANJA BARANG DAN JASA	**80.246.000**	**80.028.223**	**99.73**
3	Belanja Bahan Habis Pakai	19.051.000	19.001.000	99.74
	a. Belanja.Alat Tulis Kantor	7.966.000	7.966.000	100
	b. Belanja.Alat Listrik dan Elektronik	1.815.000	1.815.000	100
	c. Belanja.Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya	240.000	240.000	100
	d. Belanja.Peralatan Kebersihan	2.830.000	2.830.000	100
	e. Belanja.Pengisian Tabung Gas	1.200.000	1.200.000	100
	f.Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Layar	2.600.000	2.600.000	100
	g. Belanja.Perlengkapan Rumah Tangga	1.700.000	1.700.000	100
	h. Belanja cenderamata/karangan bunga/palakat	700.000	650.000	92.86
4	Belanja Jasa Kantor	35.160.000	34.992.223	86,16
	a. Belanja.Telepon	. 480.000	327.671	99,52
	b. Belanja.Air	3.600.000	3.600.000	100
	c. Belanja.Listrik	12.600.000	12.584.552	99,88
	d. Belanja.Surat Kabar/Majalah	1.980.000	1.980.000	100

	e. Belanja.Jasa Dekorasi	2.100.000	2.100.000	100
	f.Belanja Jasa Operator	14.400.000	14.400.000	100
5	Belanja Cetak dan penggandaan	6.775.000	6.775.000	100
	a. Belanja.Cetak	3.425.000	3.425.000	100
	b. Belanja.Penggandaan	3.350.000	5.110.000	100
6	Belanja Makanan dan Minuman	8.560.000	8.560.000	100
	a. Belanja.Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000	6.160.000	100
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
	b.Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.400.000	2.400.000	100
7	Belanja Pakaian Dinas & Atributnya	5.700.000	5.700.000	100
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.700.000	5.700.000	100
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.000.000	5.000.000	100
	a. Belanja.Pakaian Tradisional	5.000.000	5.000.000	100
		130.596.000	**127.778.223**	**97,84**

Tabel 3

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Padamara Tahun 2021
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA BARANG DAN JASA	**9.300.000**	**1.900.000**	**20,43**
1	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000	1.900.000	20,43
	a. Belanja.Perjalanan Dinas Biasa	6.300.000	0	0

	b. Belanja.Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota	3,000.000	1.900.000	63
		9.300.000	**1.900.000**	**20,43**

Tabel 4

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Padamara Tahun 2021
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA OPERASI	**60.000.000**	**58.407.285**	**97,35**
	BELANJA BARANG DAN JASA	**60.000.000**	**58.407.285**	**97,35**
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	22.440.000	21.896.708	97,16
	a. Belanja.Pemeliharaan Alat Angkut –alat angkutan Darat bermotor dinas perorangan	13.865.000	13.861.708	100
	b. Belanja.Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	4.275.000	3.805.000	89
2	Belanja Pemeliharaan	3.850.000	3.850.000	100
	a. Belanja.Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor –alat kantor lainnya	3.080.000	3.080.000	100
	b. Belanja.Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga –alat rumah tangga-alat pendingin	1.220.000	1.150.000	94,26
		60.000.000	**58.407.285**	**97,35**

Tabel 5

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Padamara Tahun 2021
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA MODAL	**250.000.000**	**248.531.000**	**99,4**
A	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**250.000.000**	**248.531.000**	99,4
1	Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja	**250.000.000**	**248.531.000**	99,4
	Belanja Modal Bangunan Gedung kantor	**250.000.000**	**248.531.000**	99.4
		250.000.000	**248.531.000**	**99,4**

Tabel 6

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Padamara Tahun 2021
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan laporan Kinerja SKPD

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%

	BELANJA PEGAWAI	**4.475.000**	**4.475.000**	**100**
1	Honorarium PNS			
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.870.000	2.870.000	100
	BELANJA BARANG DAN JASA	**1.605.000**	**1.605.000**	**100**
2	Belanja Bahan Pakai Habis			
	a. Belanja alat/bahan utk knt- kertas-cover	20.030.500	19.900.600	100
	Belanja alat/bahan utk knt- kertas-cover	16.102.000	16.102.000	100
	Belanja alat/bahan utk knt-bahan cetak	3.905.000	3.768.100	96,49
	Belanja alat/bahan utk knt-benda pos	710.000	670.000	94,36
	Belanja alat/bahan utk knt-bahan komputer	7.960.000	7.960.000	100
	Belanja alat/bahan utk knt- perabot kantor	3.369.000	3.369.000	100
	Belanja alat/bahan utk knt- alat listrik	1.735.000	1.734.600	99,97
	Belanja alat/bahan utk knt- Sauvenir/cendra mata	1.050.000	1.050.000	100
	Belanja alat/bahan utk knt- alat /bahan utk kegiatan kantor lainnya	1.100.000	1.100.000	100
	Belanja barang untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat	3.300.000	3.300.000	100
	Belanja natura dan pakan natura	2.530.000	2.528.500	99,94
	Belanja Makan dan minum rapat	67.366.000	56.665.000	84,11
	Belanja Pakaian Batik Nasional	18.975.000	18.034.180	95,04
	Belanja Jasa			
	Belanja Jasa Kantor			
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%

	Belanja Jasa			
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja jasa Pengelolaan BMD yg tidak menghasilkan pendapatan	1.800.000	1.800.000	100
	Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator, Pembawa acara dan Panitia	30.350.000	30.350.000	100
	Honorarium Tim Pelaksana Kegaiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	37.900.000	37.900.000	100
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	61.500.000	61.500.000	100
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.800.000	22.800.000	100
	Belanja jasa keamanan	30.400.000	30.400.000	100
	Belanja Tagihan Telpon	600.000	600.000	100
	Belanja Tagihan Air	2.520.000	1.402.758	55,67
	Belanja tagihan listrik	214.400.000	14.380.794	67,07
	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	1.060.000	1.060.000	100
	Belanja kawat/faksimil/internet/TV berlangganan	2.400.000	0	0
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			
	Belanja iuran Jaminan kesehatan bagi Non ASN	1.042.000		0
	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	250.000		0
	Belanja Iuran Jaminan kematian bagi Non ASN	372.000		0
	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use)	2.000.000	2.000.000	100
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja pemeliharaan	22,440.000	21.896.708	97,77

	Belanja Pememliharaan Peralatan dan Mesin	22.440.000	21.896.708	97,77
	a. Belanja.Pemeliharaan Alat Angkut –alat angkutan Darat bermotor dinas perorangan	13.865.000	13.861.708	99,97
	b. Belanja.Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	4.275.000	3.805.000	89
	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya	3.080.000	3.080.000	100
	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga alat pendingin	1.220.000	1.150.000	95,83
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja perjalanan dins Dalam Negeri	22.255.000	7.490.000	33,65
	Belanja perjalanan Dinas Biasa	2.780.000	1.540.000	55,39
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.475.000	1.900.000	11,53
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	3.000.000	1.900.000	63,33
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja Modal	270.000.000	268.531.000	99,45
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	100
	Belanja Modal Alat kantor	2.000.000	2.000.000	100
	Belanja Modal Penyimpanan perlengkapan Kantor	0		0
	Belanja Modal meja kursi pejabat	2.000.000	2.000.000	100
	Belanja Modal Komputer	18.000.000	18.000.000	100
	Belanja Modal Komputer Unit	18.000.000	18.000.000	100
	Belanja Modal Komputer Unit lainnya	18.000.000	18.000.000	100
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	

			Rp.	%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000	248.531.000	99,41
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000	248.531.000	99,41
	Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja	250.000.000	248.531.000	99,41
	Belanja Modal Bangunan Gedung kantor	250.000.000	248.531.000	99,41
JUMLAH		**2.880.061.000**	**2.667.219.109**	

Tabel 7

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Padamara Tahun 2021
Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan,
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA OPERASI	**161.000.000**	**158.956.000**	**98.73**
	BELANJA PEGAWAI	**17.380.000**	**17.290.000**	**99.48**
1	Honorarium PNS	17.110.000	17.020.000	99.48
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.110.000	17.020.000	99.48
	Honorarium Non PNS	270.000	270.000	100
	a. Upah Harian	270.000	270.000	100
	BELANJA BARANG DAN JASA	**143.620.000**	**141.666.000**	**98,64**
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3.088.000	3.088.000	100

	a. Belanja.Alat Tulis Kantor	2.938.000	2.938.000	100
	b. Belanja.Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	100
3	Belanja Jasa Kantor	40.740.000	40.200.000	98.67
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	a. Belanja.Jasa Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum	39.600.000	39.600.000	100
	d. Belanja Jasa Dokumentasi	240.000	0	0
	e. Belanja Jasa Publikasi	600.000	300.000	50
	f. Belanja Jasa Dekorasi	300.000	300.000	100
4	Belanja Cetak dan penggandaan	1.057.000	1.057.000	100
	Belanja.Penggandaan	1.057.000	1.057.000	100
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000	660.000	73.33
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000	660.000	73.33
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.040.000	1.750.000	85.78
	Belanja Sewa Meja Kursi	290.000	0	0
	Belanja Sewa Tenda	0	0	0
	Belanja Sewa Sound System	1.750.000	1.750.000	100
5	Belanja Makanan dan Minuman	21.380.000	21.296.000	99,61
	a. Belanja.Makanan dan Minuman Rapat	10.780.000	10.696.000	99.94
	b. Belanja.Makanan dan Minuman Tamu	10.600.000	10.600.000	100
6.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	29.915.000	29.115.000	100
	Belanja Pakaian Olahraga	4.750.000	4.750.000	100
	Belanja Pakaian Seragam Khusus	25.165.000	24.365.000	96.82

7	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000	32.500.000	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000	32.500.000	100
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	12.000.000	12.000.000	100
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000	12.000.000	100
JUMLAH		**161.000.000**	**158.956.000**	**98,73**

Tabel 8

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Padamara Tahun 2021
Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang PMD

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA OPERASI	**44.000.000**	**42.743.500**	**97,14**
	BELANJA PEGAWAI	**8.780.000**	**8.780.000**	**100**
1	Honorarium PNS	8.780.000	8.780.000	100
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Keg.	8.780.000	8.780.000	100
	BELANJA BARANG DAN JASA	**35.220.000**	**33.963.500**	**96,43**
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.000	1.552.000	100
	a. Belanja.Alat Tulis Kantor	1.552.000	1.552.000	100
	b. Belanja.Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya	0	0	0

2	Belanja Bahan/Material	0	0	0
	a. Belanja.Bahan Percontohan	0	0	0
3	Belanja Jasa Kantor	1.863.000	740.000	100
	a. Belanja.Jasa Dokumentasi	240.000	240.000	100
	b. Belanja.Jasa Dekorasi	500.000	500.000	100
	g. Belanja Jasa Hiburan/Rias	1.123.000	0	0
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
4	Belanja Cetak dan penggandaan	1.655.000	1.655.000	100
	a. Belanja.Penggandaan	1.405.000	1.405.000	100
	c. Belanja Cetak	250.000	250.000	100
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0
	a. Belanja.Sewa Meja Kursi	0	0	0
	a. Belanja.Sewa Tenda	0	0	0
	a. Belanja.Sewa Sound System	0	0	0
	a. Belanja.Sewa Panggung	0	0	0
6	Belanja Makanan dan Minuman	11.840.000	11.840.000	100
	a. Belanja.Makanan dan Minuman Rapat	11.840.000	11.840.000	100
7	Belanja Perjalanan Dinas	18.310.000	18.176.500	99,27
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000	16.800.000	100
	b. Belanja Perjalanan Luar Dalam Daerah	1.510.000	1.376.500	91,16
JUMLAH		**44.000.000**	**42.743.500**	**97,14**

Tabel 9

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Padamara Tahun 2021

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA OPERASI	**97.600.000**	**97.450.000**	**99,85**
	BELANJA PEGAWAI	30.720.000	30.720.000	100
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	Honorarium PNS	30.720.000	30.720.000	100
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.720.000	30.720.000	100
	BELANJA BARANG DAN JASA	**66.880.000**	**66.775.000**	**99.84**
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.938.000	1.938.000	100
	a. Belanja.Alat Tulis Kantor	1.758.000	1.758.000	100
	b. Belanja.Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	100
	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	0	0	0
	Belanja Bahan/Material	8.622.000	8.617.000	99.94
	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	5.572.000	5.572.000	100
	Belanja Penghargaan	3.050.000	3.045.000	99.84
	Belanja Jasa Kantor	1.140.000	1.140.000	100
	a. Belanja.Jasa Dokumentasi	240.000	240.000	100
	b. Belanja.Jasa Dekorasi	900.000	900.000	100
	c. Belanja.Jasa Hiburan/Rias	0	0	0
2	Belanja Cetak dan penggandaan	2.060.000	2.060.000	100
	a. Belanja.Penggandaan	2.060.000	2.060.000	100
3	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.160.000	4.160.000	100

	a. Belanja.Sewa Tenda	2.160.000	2.160.000	100
	a. Belanja.Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0	0	0
	a. Belanja.Sewa Sound System	1.500.000	1.500.000	100
	a. Belanja.Sewa Panggung	0	0	0
4	Belanja Makanan dan Minuman	21.960.000	21.960.000	100
No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			Rp.	%
	a. Belanja.Makanan dan Minuman Rapat	14.860.000	14.860.000	100
	b. Belanja.Makanan dan Minuman Tamu	7.100.000	7.100.000	100
5	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.000.000	7.900.000	98.75
	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	8.000.000	7.900.000	98.75
6	Belanja Perjalanan Dinas	17.150.000	17.150.000	100
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.150.000	17.150.000	100
7	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.850.000	1.850.000	100
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.850.000	1.850.000	100
8	Belanja Modal	3.000.000	3.000.000	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	100
	Belanja Modal Peralatan dan MEsin-Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	3.000.000	3.000.000	100
JUMLAH		**100.600.000**	**100.495.000**	**99,90**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Padamara Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Padamara untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang *accountable* dapat segera terwujud.

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada Bab terdahulu dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di OPD Kecamatan Padamara untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dikatakan berhasil hal ini dapat dilihat dari aspek akuntabilitas keuangan pada tabel di atas, Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Padamara Tahun 2021 dari Belanja Tidak Langsung pagu sebesar Rp.1.613.516.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 753.468.765,- atau 95,94 % dan dari Anggaran Belanja Langsung dari pagu sebesar Rp. 519.171.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 511.319.508,- atau 98,49 %

Disamping hal tersebut terdapat pula program-program Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat yang dapat difasilitasi oleh OPD Kecamatan Padamara dan seluruhnya terealisasi 100%, sebagaimana terlampir.

Dari keseluruhan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja pada OPD Kecamatan Padamara Tahun 2021 dapat dinyatakan ***"baik".*** Hasil ini dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tersebut berada pada rating 85 – 100 yaitu 84**,95** hasil dari penilaian SKM

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa kendala kecil masih kita jumpai, yaitu :

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan namun berbenturan dengan kegiatan dari tingkat pemerintahan di atasnya;
2. Sarana prasarana yang ada mengalami kerusakan pada saat dibutuhkan:
3. Tidak seimbangnya perkembangan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan kemajuan ataupun perkembangan teknologi.

C. Strategi Pemecahan Masalah.

Untuk mengurai permasalahan yang dihadapi maka strategi pemecahan masalahnya adalah :

1. Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
2. Mencari / menggunakan sarana prasarana alternatif, melakukan perawatan sarana prasarana secara rutin;
3. Memotivasi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang ada untuk mau mengejar kemajuan ataupun perkembangan teknologi;

Padamara, Januari 2021

CAMAT PADAMARA

SARNO, S.IP
Pembina
NIP. 19650622 1991012 1 001

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PADAMARA
TAHUN 2020

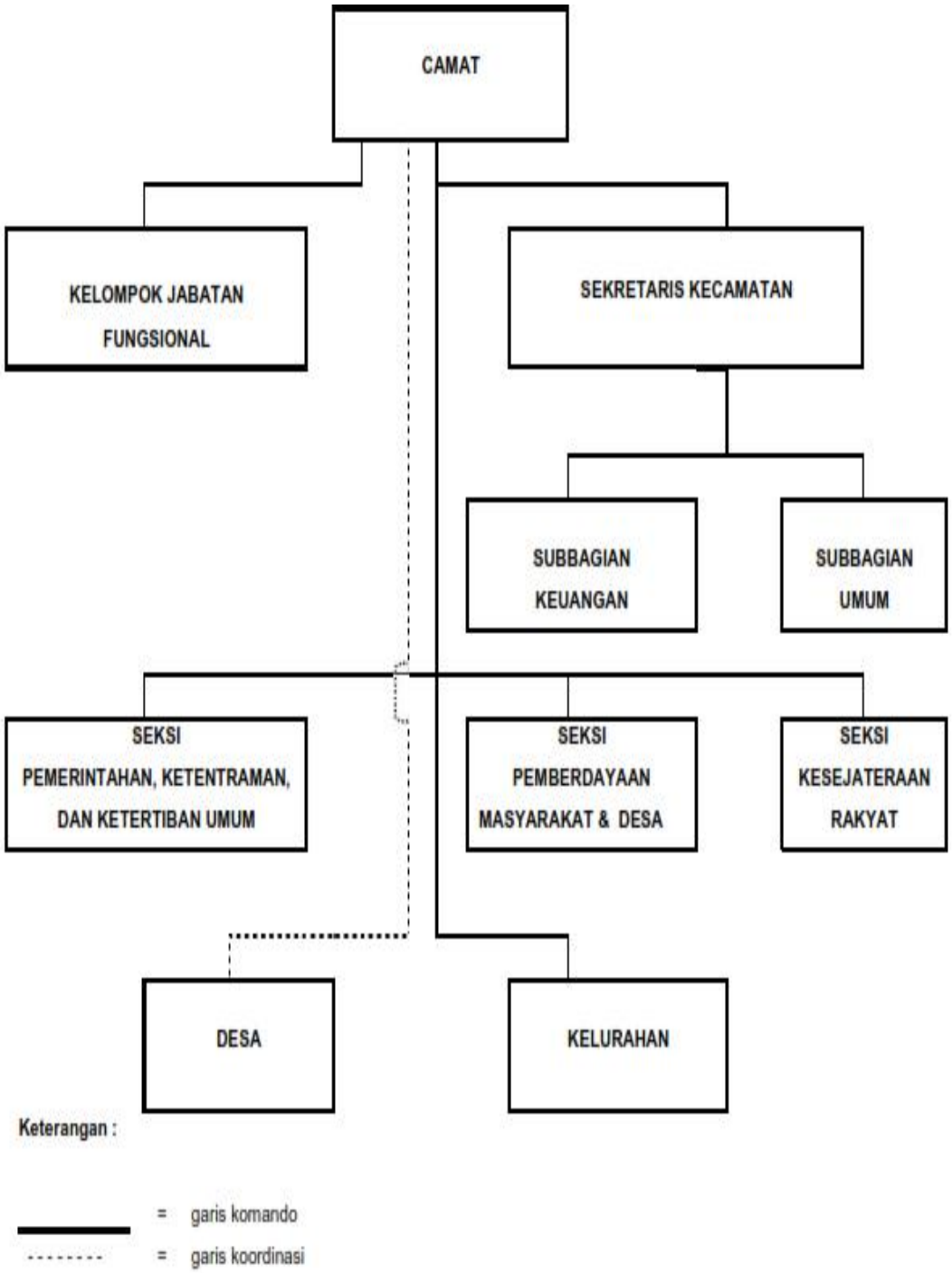
CAMAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS KECAMATAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
SEKSI KESEJATERAAN RAKYAT
DESA
KELURAHAN
Keterangan :
= garis komando
= garis koordinasi